

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi regional dapat disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK). Dimana PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (RPJMD, 2013-2018:4)²

¹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 46

² Sapriadi dan Hisbullah, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2015): 74, diakses pada 3 Februari, 2019, <http://www.journal.uin-lauidin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1155/1121>

Ahli-ahli ekonomi Klasik membagi empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi karena pertambahan penduduk ini akan memengaruhi tingkat produksi nasional dan pendapatan suatu wilayah. Uraian tersebut dapat dilihat bahwa, apabila terdapat kekurangan penduduk dan produksi marginal lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu, produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha didalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi : memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan.³

Teori Neoklasik mengatakan bahwa, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi, teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat.

Samuelson berpendapat, setiap Negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 433-434

besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh (Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung)⁴

Sirojuzilam berpendapat, pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial atau bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.⁵

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan material dan spiritual manusia.

⁴ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 52-55

⁵ Sapriadi dan Hisbullah, "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Iqtisaduna* 1, no. 1 (2015): 75, diakses pada 3 Februari, 2019, <http://www.jurnal.uin-lauid.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1155/1121>

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. Perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapasitas yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Kemudian dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Hal ini karena Islam terhubung dengan cara distribusinya, tuntutan untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat dalam suasana kemudahan dan kasih sayang, dan berbagai persyaratan yang memungkinkan mereka dapat saling memberi dan menjalankan tugas dalam kehidupan. Disisi lain, Islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.⁶

B. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk

⁶ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 124-125

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.⁷

Saat ini tidak ada suatu teori pun yang mampu untuk menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial yang dapat membantu untuk memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.⁸

1. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.⁹

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis, tetapi hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.¹⁰ Aktivitas sektor basis adalah pertumbuhan sektor tersebut menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas sektor non basis merupakan sektor sekunder (*city polowing*) artinya tergantung perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh.

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis dampak

⁷ Lincoln Arsyad. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 108-109

⁸ Lincoln (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 114

⁹ Lincoln (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 116

¹⁰ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 28

tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap permintaan akan barang dan jasa dari luar. Lebih lanjut dalam analisis teori basis ekonomi, teori tersebut dapat digunakan sektor dan subsector potensial di Kabupaten Kudus berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila sektor potensial tersebut dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Menurut teori ini, suatu daerah dapat dibedakan menjadi daerah andalan dan bukan andalan, yang selanjutnya dimodifikasi menjadi sektor/subsektor ekonomi potensial dan bukan sektor/subsektor ekonomi potensial.¹¹

2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran (*role*) yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai:

a. Entrepreneur

Dengan perannya sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

¹¹ Kalzum R. Jumiyanti, *Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo*, Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universtitas Gorontalo 1, No.1 (2018) : 32 diakses pada 1 April 2019, <https://download.garuda.ristekdikti.go.id/AnalisisLocationQuotientdalamPenentuanSektorBasisdanNonBasisdiKabupatenGorontalo>

b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi bisa melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran dan sebagainya.

Dalam perannya sebagai koordinator, pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana, dan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional (pusat) dan menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut. Misalnya dengan cara pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan outlets untuk produk-produk industri kecil, membantu industry kecil melakukan pameran.¹²

¹² Lincolin Arsyad. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2002), 120-121

3. Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Sektor *private* (swasta) memiliki peran penting dalam pembangunan. Beberapa peran swasta antara lain sebagai berikut:

- a. *Development agent*, atau agen pembangunan. Dalam hal ini sektor swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan diberbagai sektor yang mampu bergerak disemua sektor yang halal, namun tidak termasuk sektor yang hanya dikuasai oleh sektor public yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.
- b. *Prime mover of development*, atau penggerak utama dari pembangunan. Pihak swasta mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja. Swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, selain yang ditawarkan oleh institusi pemerintah
- c. *Innovator and technological advancement*, dimana sektor swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi ini kemudian diharapkan akan mampu mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien.
- d. Parter sektor public dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Swasta juga mampu memberikan jasa layanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang sudah disediakan pemerintah.¹³

C. Teori Sektor (*Sector Theory of Growth*)

Setiap wilayah mengalami perkembangan meliputi siklus jangka pendek dan jangka panjang. Faktor-faktor dalam analisis perkembangan jangka pendek yang umumnya digunakan adalah penduduk, tenaga kerja, upah, harga, teknologi dan distribusi penduduk, tetapi laju pertumbuhan

¹³Irfan Syauqi Beiq dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 126

jangka panjang biasanya diukur menurut keluaran (*output*) dan pendapatan. Pada umumnya pertumbuhan dapat terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor penentu endogen maupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat didalam wilayah yang bersangkutan atau faktor-faktor diluar wilayah atau kombinasi dari keduanya.

Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori sektor. Teori ini dikembangkan berdasar hipotesis Clark-Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder), kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (*sector shift*). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah.

Alasan dari perubahan atau pergeseran dari sektor tersebut dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi permintaan, yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan jasa yang disupply oleh industri manufaktur dan industri jasa adalah lebih tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer. Maka pendapatan yang meningkat akan diikuti oleh perpindahan (lealokasi) sumber daya dari sektor primer ke sektor manufaktur dan sektor jasa. Sisi penawaran, yaitu lealokasi sumber daya tenaga kerja dan modal dilakukan sebagai akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor tersebut. Kelompok sektor-sektor sekunder dan tersier menikmati kemajuan yang lebih besar dalam tingkat produktivitas. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas yang lebih cepat (kombinasi dari keduanya, misalnya dalam skala ekonomi), karena produktivitas yang lebih tinggi baik untuk tenaga kerja maupun untuk modal, dan penghasilan yang lebih tinggi tersebut memungkinkan untuk melakukan lealokai sumber daya.

Tingkat pertumbuhan produktivitas tergantung pada inovasi dan kemajuan teknik ataupun skala ekonomi. Jika produktivitas lebih tinggi dalam industri-industri, permintaan terhadap produk-produknya akan meningkat cepat, maka

terdapat kausalitas “produktivitas-harga rendah-permintaan bertambah luas”, bukan sebaliknya.

Terjadinya perubahan atau pergeseran sektor dan evaluasi spesialisasi (pembagian kerja) dipandang sebagai sumber dinamika pertumbuhan wilayah. Suatu perluasan dari teori sektor ini adalah teori tahapan (*stages theory*), yang menjelaskan bahwa perkembangan wilayah merupakan proses evolusioner internal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan perekonomian sub sistem swasembada dimana hanya terdapat sedikit investasi atau perdagangan. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian.
2. Dengan kemajuan transportasi diwilayah yang bersangkutan akan mendorong perdagangan dan spesialisasi. Industri pedesaan masih bersifat sederhana (tradisional) untuk memenuhi kebutuhan para petani.
3. Dengan bertambah majunya perdagangan antar wilayah, maka wilayah yang maju akan memprioritaskan pada pengembangan sub sektor tanaman pangan, selanjutnya diikuti oleh sub-sub sektor peternakan dan perikanan.
4. Industri sekunder berkembang, pada permulaan mengolah produk-produk primer, kemudian diperluas dan semakin lebih berspesialisasi.
5. Pengembangan industri tersier (jasa) yang melayani permintaan dalam wilayah maupun diluar wilayah.

D. Struktur Industri dan Pertumbuhan Wilayah (*Industrial Structure and Regional Growth*)

Interpretasi pertumbuhan wilayah dalam arti dinamika struktur industri adalah sangat penting karena kerangka dasar analisis pertumbuhan wilayah dan lokasi industri secara komprehensif dan konsisten diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi ekonomi sub nasional (wilayah) dan pembangunan fisik. Analisis tersebut menggunakan tiga asumsi, yaitu bahwa pertumbuhan wilayah secara *overall* (volume kegiatan ekonomi) ditentukan oleh kondisi bermacam-macam faktor lain dari pada pendapatan regional perkapita (aspek kesejahteraan dari pertumbuhan); bahwa pembangunan masa depan adalah hasil dari kegiatan dan keputusan masa lalu dan sekarang, dan sangat penting dari semua itu adalah bahwa faktor-faktor kritis dalam pola pertumbuhan wilayah yang terus

berubah itu adalah hasil keputusan perusahaan-perusahaan mengenai lokasi dan output (jika dilihat kebelakang adalah sebagai input dan dihubungkan kedepan adalah pasar dari industri-industri dalam perekonomian). Kinerja pertumbuhan suatu wilayah individual dapat dianalisis peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan wilayah mempunyai kaitan erat dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional mendorong pembangunan wilayah dan pembangunan wilayah memperkuat pembangunan nasional.

Peranan suatu wilayah sebagai komponen (bagian) ekonomi nasional di representasikan oleh sektor industri dan struktur industri yang terdapat pada masing-masing wilayah. Ada suatu wilayah yang memiliki keunggulan lokasional (*locational advantage*) yang memungkinkan pengembangan industri. Sebaliknya wilayah-wilayah lain tidak memiliki keunggulan lokasional sehingga pengembangan industri mengalami hambatan.

Tanpa memandang industri itu berkembang cepat atau lambat, yang penting diukur adalah proporsi atau kontribusi sektor industri dimasing-masing wilayah terhadap total industri nasional (indikator pertumbuhan lain, misalnya penduduk dan pendapatan). Analisis kontribusi (*share analysis*) ini memberikan gambaran struktur suatu wilayah secara statis. Para peneliti telah berupaya untuk mengkaji struktur wilayah secara dinamis dengan menerapkan *shift analysis* (analisis pergeseran). Analisis ini membandingkan perubahan regional yang terjadi disuatu wilayah antara dua titik waktu tertentu, dan khususnya mengkonsentrasikan pada apakah perubahan regional itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan perubahan rata-rata nasional (yaitu apakah terjadi pergeseran atau perubahan yang menaik atau menurun).

Perubahan regional terdiri dari dua komponen, yaitu pergeseran proporsional (*proportionality shift*) dan pergeseran diferensial (*differential shift*). Pergeseran proporsional mengukur pengaruh komposisi industri yang dilihat secara nasional bahwa beberapa sektor mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Jadi, suatu wilayah yang memiliki sektor-sektor yang tingkat pertumbuhannya lamban akan memperlihatkan pergeseran proporsional yang menurun. Sebaliknya suatu wilayah yang mempunyai sektor-

sektor yang tingkat pertumbuhannya tinggi akan memperlihatkan pergeseran yang menaik.

Pergeseran diferensial terjadi dari keadaan bahwa industri-industri tumbuh di beberapa wilayah lebih cepat dari wilayah-wilayah lain. Wilayah-wilayah yang mempunyai karakteristik pergeseran yang menaik adalah daerah-daerah yang memiliki keunggulan lokasional yang memungkinkan pengembangan kegiatan-kegiatan tertentu lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain.

Penting untuk mengetahui bahwa pengaruh proporsional dan diferensial itu berbeda karena mempunyai kekuatan-kekuatan yang berbeda. Untuk memahami pengaruh proporsionalitas, perlu diperhatikan kekuatan yang mempengaruhi komposisi output pada konteks nasional.

Diantara kekuatan-kekuatan dominan, yaitu perubahan produktivitas pada sisi suplai (penawaran) yang memungkinkan sumberdaya-sumberdaya berpindah dari sektor yang memiliki produktivitas rendah ke produktivitas tinggi dan elastisitas pendapatan dari permintaan pada sisi *demand*. Kekuatan-kekuatan lainnya, misalnya perubahan teknologi, introduksi produk-produk baru, perubahan cita rasa, dan lainnya, mempengaruhi komposisi output nasional secara berlebihan. Selanjutnya perlu menganalisis keunggulan setiap wilayah untuk industri-industri yang dimiliki yang berkembang cepat atau lambat nasional.

Pengaruh diferensial dapat dijelaskan bahwa beberapa wilayah memperoleh keunggulan relatif selama suatu jangka waktu karena memiliki aksesibilitas terhadap pasar dan atau terhadap input untuk industri-industri spesifik.¹⁴

E. Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang memasok inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya. Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak

¹⁴ Rahardjo Adi Sasmita, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 31-35

hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut:

1. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi
2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran relatif besar
3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi, baik keterkaitan kedepan ataupun kebelakang
4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.¹⁵

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa sektor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Teori tempat sentral (*Central Place Theory*), ini menganggap bahwa ada hirarki tempat (*hierarchy of place*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumber daya (industri dan bahan baku).

Kekuatan kekuasaan pasar cenderung memperparah kesenjangan daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang). Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini dikatakan sebagai *back wash affects*. Dalam berbagai perkembangannya sektor-sektor tersebut tumbuh menjadi sektor unggulan baik dalam antar sektor internal daerah tersebut maupun antar wilayah.

Teori pembangunan daerah yang ada sekarang ini belum mampu menjelaskan kegiatan-kegiatan perekonomian daerah secara tuntas dan komprehensif. Beberapa pendekatan

¹⁵ Daryono Soebagiyo dan Arifin Sri Hascaryo, Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah (University Research Colloquium, ISSN 2407-9189, 2015), 141, diakses pada 18 Mei 2019, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitsteam/handle/11617/5126/13>

alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu pendekatan yang selama ini dipakai antara lain analisis *location quation* (LQ) dan *shift share*. Keduanya digunakan untuk mengetahui sektor unggulan atau sektor basis dalam pembangunan ekonomi.

1. Analisis *Location Quetient* (LQ)

Analisis LQ ini digunakan untuk memperluas analisis *shift share*. Dasar pemikiran analisis LQ adalah teori *economic base* yang intinya yaitu menentukan sektor ekonomi tertentu yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri maupun kebutuhan diluar daerah yang bersangkutan (sektor basis). Dengan penjualan keluar daerah akan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi didaerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Kenaikan permintaan sektor basis (unggulan) ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor atau industri non basis yang lain.

Keunggulan bersaing dari sektor basis didaerah tersebut akan semakin tinggi jika kawasan atau daerah tersebut memiliki kompetensi inti yang dapat dibedakan dari kawasan lain. Kompetensi inti dapat diwujudkan melalui *create factor* yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang bisa mendatangkan prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Kompetensi inti didefinisikan sebagai proses pembelajaran kolektif dari masyarakat atau organisasi dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai keahlian dan teknologi.

Pengembangan sektor unggulan, kompetensi inti terkait dengan upaya untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan sektor-sektor yang berkembang diwilayah tersebut. Semakin baik koordinasi dan integrasi didaerah sektor unggulan yang dikembangkan dalam wilayah itu, semakin tinggi tingkat kematangan kawasan tersebut dalam

proses pembangunan, sehingga sulit bagi kawasan lain untuk menyaingi.¹⁶

Teknik Analisis Location Quotient ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk disuatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja disetiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Secara umum, metode analisis LQ dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LQ = (Vik/Vk) / (Vip/vp)$$

Keterangan :

Vik : nilai PDRB sektor i Kabupaten Kudus

Vk : nilai total PDRB semua sektor Kabupaten Kudus

Vip : nilai PDRB sektor i Provinsi Jawa Tengah

Vp : nilai total PDRB semua sektor Provinsi Jawa Tengah

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis atau sektor unggulan dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis atau bukan sektor unggulan (sektor lokal/impor).¹⁷

2. Analisis *Shift Share*

Analisis *shift share* juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kabupaten/kota dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan sedangkan metode *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasi berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke

¹⁶ Hadi Sumarsono, dkk, *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah* (Malang : ISBN, 2017), 7-9, Ebook diakses pada 15 Mei 2019, <https://books.google.co.id/books>

¹⁷ Arsyad, Lincolyn. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE, 2005)

kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Ada juga yang menamakan model analisis ini sebagai *industrial mix analysis*, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *shift share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak di gunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan.

Pertambahan lapangan kerja (*employment*) regional total, dapat diurai menjadi komponen *shift* dan komponen *share*. Komponen *share* sering pula disebut komponen *national share*. Komponen *national share* adalah banyaknya pertambahan lapangan kerja regional seandainya proporsi perubahannya sama dengan laju pertumbuhan nasional selama periode analisis. Hal ini dapat di gunakan sebagai kriteria bagi daerah yang bersangkutan untuk mengukur apakah daerah itu tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dari pertumbuhan nasional rata-rata.

Komponen “*shift*” adalah penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan lapangan kerja regional. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja secara nasional. Bagi setiap daerah, *shift netto* dapat di bagi menjadi dua komponen, yaitu *proportional shift component* dan *differential shift component*.

Proportional shift component dikenal sebagai komponen struktural atau *industrial mix*, mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh komposisi sektor-sektor industri di daerah yang bersangkutan. Komponen ini positif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh

cepat dan negatif di daerah yang berspesialisasi dalam sektor yang secara nasional tumbuh lambat atau merosot.

Differential shift component, dinamakan komponen lokasional atau regional adalah sisa kelebihan. Komponen ini mengukur besarnya shift regional netto yang diakibatkan oleh sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat di daerah yang bersangkutan dari pada tingkat nasional yang disebabkan oleh faktor lokasional intern. Jadi, suatu daerah yang mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah dan efisien akan mempunyai *differential shift component* yang positif, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Analisis *shift share* adalah alat analisis untuk mengetahui pergeseran kontribusi dan sumbangannya terhadap sistem perekonomian yang lebih luas. *Shift share* digunakan untuk melihat adanya perubahan kesempatan kerja atau produksi suatu wilayah dan daerah yang disebabkan oleh perubahan kesempatan kerja atau produksi ruang lingkup regional secara umum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode ini akan dapat mengetahui potensi setiap kabupaten/kota dalam pertumbuhan wilayah.¹⁸

Bentuk umum analisis shift share dan komponen-komponennya adalah:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan:

i = sektor-sektor ekonomi yang diteliti

j = variabel wilayah yang diteliti (Kabupaten Kudus)

D_{ij} = perubahan sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)

¹⁸ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85

N_{ij} = pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)
 M_{ij} = bauran industri sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)
 C_{ij} = keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)
 E_{ij} = PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)
 r_{ij} = laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Kudus)
 r_{in} = laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Jawa Tengah)
 r_n = laju pertumbuhan PDRB di daerah n (Provinsi Jawa Tengah)

Masing-masing laju pertumbuhan didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Mengukur laju pertumbuhan sektor i di wilayah j

$$r_{ij} = (e^{*ij} - e_{ij}) / e_{ij}$$
- 2) Mengukur laju pertumbuhan sektor i perekonomian nasional

$$r_{in} = (e^{*in} - e_{in}) / e_{in}$$
- 3) Mengukur laju pertumbuhan nasional

$$r_n = (e^{*n} - e_n) / e_n$$

Keterangan:

e^{*in} = PDRB sektor i di tingkat nasional pada tahun terakhir analisis

e_{in} = PDRB sektor i di tingkat nasional pada suatu tahun dasar tertentu

e^{*ij} = PDRB sektor i di wilayah j pada tahun terakhir analisis

e_{ij} = PDRB sektor i di wilayah pada suatu tahun dasar tertentu

e^{*n} = PDRB nasional pada tahun terakhir analisis

e_n = PDRB nasional pada suatu tahun dasar tertentu¹⁹

F. Pendapatan Daerah

Pendapatan regional atau daerah adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut.

1. Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

Angka pendapatan regional dalam beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat

¹⁹ Arsyad, Lincolyn. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE, 2005)

pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor berikut.

- a. Kenaikan atau penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- b. Kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat harga.

Oleh karena itu, untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah di tiadakan merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka pendapatan regional perlu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk menentukan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual. Oleh karena itu, harga jual harus dideflasi dengan menggunakan indeks inflasi atau deflator lain yang dianggap lebih sesuai.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, dimana faktor perubahan harga telah dikeluarkan.

Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain:

- a. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi diwilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industry Pengolahan; 4. Listrik, Gas dan Air Bersih; 5. Bangunan; 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
- b. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/entrepreneurship); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

- c. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2. Konsumsi pemerintah, 3. Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4. Perubahan stok, dan 5. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.²⁰

3. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini seringkali tidak diperoleh sehingga diganti dengan total Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan per kapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.²¹

²⁰ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN YOGYAKARTA, 2006), 78-79

²¹Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 20-21

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Jadi, dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestic regional bruto atas dasar harga pasar.²²

4. Distribusi Pendapatan dalam Pembangunan Ekonomi

Badan Riset dari Bank Dunia dan *Institute of Development Studies* dari Universitas Sussex telah mengadakan usaha bersama untuk mengadakan serentetan analisa mengenai distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi Negara-negara berkembang. Diantara analisa tersebut adalah analisa Ahluwalia, yang memberikan gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara dan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap distribusi pendapatan.

Analisa Ahluwalia memberikan gambaran mengenai *distribusi pendapatan relative* maupun *distribusi pendapatan mutlak*. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan relative adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, dan penggolongan ini didasarkan kepada besarnya pendapatan yang mereka terima. Sedangkan yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah presentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya.²³

²²Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 18-19

²³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI dengan Bima Grafika, 1985), 60-61

5. Prinsip Dasar Distribusi dalam Ekonomi Islam

Salah satu bidang terpenting dalam ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen.

Dari sekian banyak cara untuk membangkitkan kesejahteraan umat adalah menumbuhkan semangat pendistribusian harta seorang Muslim kepada masyarakat. Hal tersebut bisa terealisasi ketika seseorang seimbang dalam pengeluarannya (konsumsinya). Wujud dari keadilan distribusi tersebut adalah dengan mengalirnya saluran-saluran distribusi harta umat Islam melalui berbagai macam aktivitas kebaikan yang kemudian bisa berkembang ke wilayah investasi berskala mikro.

Dengan beberapa sistem manajerial yang baik, maka beberapa investasi tersebut akan berkembang ke arah penciptaan lapangan kerja baru yang akan bisa menjadi Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada suatu komunitas masyarakat. Hal ini sesuai dengan beberapa tujuan kebijakan ekonomi seperti yang telah dinyatakan oleh Monzer Kahf, yaitu: (1) memaksimalkan tingkat pemanfaatan sumber-sumber; (2) minimalisasi kesenjangan distribusi, dan ; (3) pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomik. Imam Ali r.a. diriwayatkan pernah mengatakan bahwa, *“janganlah kesejahteraan salah seorang diantara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun.”* Atau dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai *efficient allocation of goods*, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan *utility*-nya, tanpa mengurangi *utility* orang lain. kaitannya dengan efisiensi alokasi, para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil, berbagai macam pendapat tersebut antara lain:

- a. Konsep *egalitarian*: setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama.
- b. Konsep *Rawlsian*: maksimalisasi *utility* orang yang paling miskin (*the least well person*)

- c. Konsep *utilitarian*: memaksimalkan total *utility* dari setiap orang dalam kelompok masyarakat.
- d. Konsep *market oriented*: hasil pertukaran melalui mekanisme pasar yaitu yang paling adil.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam dibangun diatas nilai moral yang mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil. Adil berarti tidak ada yang menzalimi orang lain dan juga dizalimi orang lain. suatu Negara walaupun pendapatan per kapitanya naik dua kali lipat, akan tetapi jika angka pengangguran tidak berkurang, angka kemiskinan tidak berkurang, dan distribusi pendapatan tidak merata, maka Negara tersebut belum bisa diyakini telah berhasil melakukan pembangunan dengan baik.

Ketika Allah mengisyaratkan bahwa nikmat yang diberikan kepada hamba-hambaNya sangat beragam dan manusia tidak bisa menghitungnya dengan pasti, maka secara tidak langsung manusia akan menemukan sumber ekonomi dan rezeki yang baru saat ada kebutuhan muncul dalam kehidupan manusia dan selalu akan ada teknologi yang baru dalam mengatasi kelangkaan yang ada. Ada satu wilayah yang mengalami kesejahteraan, sementara wilayah lainnya mengalami kekurangan pangan itu adanya kesenjangan diantara manusia dalam pemenuhan pokoknya disebabkan karena adanya ketidakstabilan dalam distribusi. Akibat dari ketidakstabilan distribusi adalah masyarakat miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling dasar dalam hidupnya. Maka dari itu, keadilan dalam distribusi haruslah ditegakkan.²⁴

G. Tenaga Kerja

Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi kearah yang lebih baik. Disamping kedua pendapat ini, ada pula pendapat

²⁴Ika Yunia F, dan Abdul Kadir R, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 155-159

yang mengatakan bahwa jumlah penduduk suatu negara harus seimbang dengan jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampaui sedikit tetapi juga tidak boleh terlampaui banyak.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta ketrampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru. Dengan demikian, pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran.

Pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.²⁵

1. Teori Ketenagakerjaan

Teori Lewis mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output dan penyedia pekerja disektor lain.

Ada dua struktur di dalam perekonomian Negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja dan tingkat upah relatif murah daripada sektor kapitalis modern. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi

²⁵ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 55-56

pengusaha diperkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran pekerja disektor subsisten terbelakang akan diserap.

Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan/ketimpangan tingkat pendapatan antara perkotaan dan pedesaan.

Menurut Lewis, adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaiknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

Teori Fei-Ranis mengemukakan bahwa yang berkaitan dengan Negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, dimana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industry dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industry. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industry yang meningkat terus menerus sejalan dengan penambahan output dan perluasan usahanya.²⁶

²⁶ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 58-59

Sumber daya manusia atau *Human Resources* mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya manusia juga mengandung pengertian sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok usia kerja tersebut disebut tenaga kerja atau *Man power*.²⁷

2. Konsep Ketenagakerjaan

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- b. Angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.
- c. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.
- d. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

²⁷ Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2002), 108

- e. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.
- f. Setengah menganggur (*underemployment*) adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya.
- g. Setengah menganggur yang kentara (*visible underemployment*) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) diluar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
- h. Setengah menganggur yang tidak kentara (*invisible underemployment*) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi pekerjaannya itu dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.
- i. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) adalah dalam angkatan kerja mereka dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya: pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dua orang, tetapi dikerjakan oleh tiga orang sehingga satu orang merupakan disguised unemployment.
- j. Pengangguran *friksional* adalah pengangguran yang terjadi akibat pindahnya seorang dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggang waktu dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain tersebut.
- k. Pengangguran *structural* adalah pengangguran yang disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur para pencari kerja-sehubungan dengan ketrampilan, bidang keahlian maupun daerah lokasinya-dengan struktur permintaan tenaga kerja yang belum terisi.²⁸

²⁸ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 59-61

3. Struktur Ketenagakerjaan

Struktur perekonomian suatu Negara dapat dicerminkan dengan, antara lain struktur lapangan pekerjaan utama, struktur jenis pekerjaan utama, dan status pekerjaan utama dari para pekerjanya.

Lapangan pekerjaan utama seseorang adalah bidang kegiatan utama pekerja tersebut. Lapangan pekerjaan utama biasanya digolongkan atas: 1) pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industri pengolahan; 4) listrik, gas dan air; 5) bangunan; 6) perdagangan besar, eceran dan rumah makan; 7) angkutan, pergudangan, dan komunikasi; 8) keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah, sera jasa perusahaan; 9) dan, jasa kemasyarakatan.

Jenis pekerjaan utama seseorang adalah macam pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut. Jenis pekerjaan utama biasanya digolongkan atas: 1) tenaga professional, teknisi dan sejenisnya; 2) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; 3) tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis; 4) tenaga usaha penjualan; 5) tenaga usaha jasa; 6) tenaga usaha pertanian, perburuan dan perikanan; 7) dan tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar.

Status pekerjaan utama seseorang adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Status pekerjaan utama biasanya terdiri atas: 1) Buruh atau karyawan adalah pekerja yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau gaji baik berupa uang maupun barang; 2) Berusaha sendiri, bila pekerja tersebut bekerja atas risikonya sendiri dan dalam usahanya tidak mempekerjakan orang lain; 3) berusaha dengan dibantu pekerja keluarga atau buruh tidak tetap. Bila pekerja tersebut bekerja atas risikonya sendiri, tetapi dalam usahanya dia mempekerjakan anggota keluarga atau buruh tidak tetap; 4) Pekerja keluarga, yaitu pekerja yang tidak mendapat upah, baik dalam bentuk uang maupun barang; 5) Berusaha dengan buruh tetap, bila pekerja tersebut

bekerja atas risiko sendiri dan dalam melaksanakan usahanya dia mempekerjakan buruh tetap.²⁹

4. Permintaan dan Penawaran Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengambil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya. Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, dimana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi.³⁰

5. Bekerja dalam Perspektif Islam

Menurut Imam Syaibani “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk

²⁹ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 71-72

³⁰ Maimun Sholeh, “Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah : Teori serta Beberapa Potretnya di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 4, No. 1 (2007) : 63-66, diakses pada 20 Maret, 2019, <https://www.google.com/journal.uny.ac.id>

memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untyuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai firman Allah dalam QS. AN-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl: 97)³¹

Sedangkan hadits nabi yang berkaitan dengan bekerja dapat dikemukakan antara lain:

Dari Ibn Umar r.a ketika nabi ditanya: usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab yaitu pekerjaan yang dilakukam oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik.

³¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 227

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: Rasulluah SAW ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (H.R. Baihaqi dan Alhakim; Shahih Lighairihi).

Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam QS. Al-balad:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ.

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.

Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya.³²

Kemudian pada hakikatnya sebagai peran sumber daya manusia dalam ekonomi pembangunan Islam adalah bahwa negeri yang kaya dengan sumber daya alam , tidak otomatis memberikan kemakmuran bagi warga masyarakatnya, jika sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kemampuan (*skill*) dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam tersebut. sebaliknya, sebuah negeri yang

³² Anita Rahmawaty, *Ekonomi Makro Islam*, (Kudus, DIPA STAIN Kudus, 2009), 300-301

miskin akan sumber daya alam, namun memiliki kemampuan yang memadai, akan lebih cepat berkembang dibandingkan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam proses pemakmuran sebuah negeri. Sumber daya manusia (SDM) berperan ganda, baik sebagai objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, SDM merupakan sasaran pembangunan untuk mendapatkan kesejahteraan, sedangkan sebagai subjek pembangunan, SDM berperan sebagai pelaku pembangunan yang sangat menentukan kemajuan (Ariani, 2000).³³

H. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Herman Syahputra, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur	<i>“Analisis Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Aceh Barat.”</i>	Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa struktur perekonomian di Aceh Barat mengalami pergeseran dari sektor sekunder dan tersier ke sektor primer. Terjadinya pergeseran dalam struktur perekonomian Aceh Barat ini ditandai dengan terjadinya variasi pergeseran dari tahun ke tahun. Secara rata-rata, perekonomian Aceh Barat tahun 2001-2013 memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dalam analisisnya menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalan, dan sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan (sektor basis) yang potensial untuk dikembangkan di Aceh Barat, disamping itu juga diharapkan akan dapat mampu memenuhi kebutuhan luar daerah lainnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman Syahputra, dkk yaitu sama-sama membahas mengenai sektor

³³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 176

			<p>unggulan perekonomian. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Herman Syahputra, dkk adalah jika dalam penelitian Herman Syahputra, dkk membahas juga mengenai perubahan struktur perekonomian, maka dalam penelitian ini mengkaitkan sektor unggulan perekonomian tersebut dengan upaya penyerapan tenaga kerja.</p>
2.	<p>Ekaristi Jekna M, Debby Rotinsulu, dan Wensy Rompas</p>	<p>“<i>Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan</i>”</p>	<p>Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan menggunakan dua metode perhitungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Metode <i>Location Quotient</i> (LQ) bahwa sektor pertambangan merupakan sektor unggulan, karena wilayah Minahasa Selatan mempunyai potensi pertambangan yang sangat diperlukan dan bisa diekspor untuk mendorong sektor pertambangan menjadi sektor unggulan. b. Metode perhitungan <i>Shift Share</i> bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dikarenakan terjadi peningkatan absolut dimana sektor ini diunggulkan dan menjadi pendorong kinerja perekonomian daerah. <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ekaristi Jekna, dkk yaitu sama-sama membahas mengenai sektor unggulan perekonomian. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ekaristi, dkk adalah penelitian Ekaristi, dkk hanya membahas mengenai sektor unggulan perekonomian, tetapi penelitian ini juga mengkaitkan dengan upaya penyerapan tenaga kerja.</p>
3.	<p>Lismuba Indriani dan</p>	<p>“<i>Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia:</i></p>	<p>Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa sektor unggulan atau sektor kunci perekonomian di Indonesia</p>

	<p>Mohammad Abdul Mukhyi</p>	<p><i>“Pendekatan Input-Output”</i></p>	<p>adalah sektor perdagangan karena merupakan sektor yang memiliki daya indeks kepekaan paling tinggi (indeks total keterkaitan ke depan) dan sektor industry minyak dan lemak yang memiliki daya penyebaran yang lebih besar (indeks total keterkaitan ke belakang) dibanding sektor yang lain. Kedua sektor itulah yang menjadi peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia dan menarik indeks pendapatan masyarakat.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lismuba dan Mukhyi yaitu, sama-sama membahas mengenai sektor unggulan perekonomian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian mereka adalah penelitian Lismuba dan Mukhyi hanya membahas mengenai sektor unggulan perekonomian diseluruh Indonesia, tetapi penelitian ini juga mengkaitkan dengan penyerapan tenaga kerja serta hanya di lingkup daerah.</p>
<p>4.</p>	<p>Fitri Amalia</p>	<p><i>“Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB”</i></p>	<p>Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa sektor industry pengolahan merupakan sektor basis yang memiliki indeks terbesar dibandingkan sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor basis ini merupakan modal yang cukup baik bagi perkembangan kabupaten Bone Bolango. Sedangkan sektor yang merupakan sektor kompetitif adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian Fitri Amalia yaitu sama-sama membahas mengenai sektor unggulan perekonomian. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Fitri Amalia adalah penelitian Fitri hanya</p>

			mengenai sektor unggulan perekonomian, maka penelitian ini juga mengkaitkan dengan penyerapan tenaga kerja.
5.	Mahmud Basuki dan Febri Nugroho	<i>“Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient”</i>	berkesimpulan bahwa sektor unggulan kabupaten Sleman ada empat sektor, yaitu sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor <i>real estate</i> , dan sektor jasa perusahaan. Sedangkan untuk sektor terbelakang Kabupaten Sleman ada lima, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian Mahmud dan Febri yaitu sama-sama membahas mengenai sektor unggulan perekonomian. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Mahmud dan Febri adalah penelitian mereka hanya mengenai sektor unggulan perekonomian, maka penelitian ini juga mengkaitkan dengan penyerapan tenaga kerja.

I. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan gambaran tentang Analisis Sektor Unggulan Perekonomian dalam Peningkatan PDRB sebagai Upaya Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Kudus

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

